

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara. Demokrasi saat ini menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan di berbagai negara. Prinsip dasar demokrasi mengemukakan bahwa kekuasaan dan wewenang pemerintah berasal dari rakyat serta dijalankan demi kepentingan rakyat. Sistem ini mendorong pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan transparan, dengan menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, regulasi atau aturan bersama diperlukan guna menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna menjamin serta melindungi hak-hak rakyat. Konstitusi UUD 1945 menjadi landasan hukum dan pedoman utama dalam pemenuhan kedaulatan rakyat di Indonesia. UUD 1945 menggarisbawahi prinsip kedaulatan rakyat dalam dua bagian. Pertama, dalam alinea keempat pembukaannya, dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, pada Pasal 1 Ayat (2) hasil amandemen, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. UUD 1945 dengan jelas menjadi dasar pemerintahan demokratis karena berlandaskan kedaulatan rakyat (Akbar et al., 2023).

Bentuk perwujudan dari demokrasi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Salah satu instrumen utama untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Dengan pembagian jenis Pemilu yang terdiri dari Pemilihan Legislatif, yang melibatkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dari tingkat nasional hingga daerah, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mencakup pemilihan Gubernur di tingkat provinsi serta Bupati atau Wali Kota di tingkat kabupaten/kotakepala daerah (Pilkada) (Rustamana et al., 2023)

Pilkada menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis di daerah. Hal ini ditujukan untuk menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan serta menciptakan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat melalui proses yang transparan dan adil. Pemilihan kepala daerah telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dengan masa jabatan selama lima tahun dan pemilihan diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkada serentak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dirancang untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam undang-undang ini, tahapan Pilkada diatur secara rinci untuk memastikan setiap proses berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tahapan Pilkada dimulai dengan penetapan jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memastikan semua tahapan terlaksana dengan terstruktur. Penetapan ini memastikan bahwa setiap tahap berlangsung secara terstruktur, termasuk pendaftaran pasangan calon, masa kampanye,

pemungutan suara, dan penghitungan hasil pemilu (Muhammad Ayub Liwang, 2016).

27 November 2024, Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak diseluruh daerah di Indonesia. Terlepas dari banyaknya dinamika yang terjadi pada Pilkada 2024 seperti gerakan kotak kosong di beberapa daerah, kemenangan 100% salah satu paslon di kota Banjarbaru, ataupun Pilkada DKI Jakarta yang cukup panas, penulis tertarik dengan Pilkada yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Majalengka terdapat dua pasangan calon yang bersaing. Pasangan nomor urut satu adalah Eman Suherman bersama Dheni Muhammad Ramdhan, sementara pasangan nomor urut dua yaitu Karna Sobahi dan Koko Sukoyo.

Pilkada ini menarik perhatian penulis karena terjatuhnya bupati petahana, Karna Sobahi dari kursi kepemimpinan bupati Majalengka. Karna Sobahi mendapatkan survei kepuasan yang cukup tinggi dalam kinerja selama menjabat menjadi bupati. Di lansir dari lembaga survei Saeful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Karna Sobahi mendapatkan presentase tingkat kepuasan sebanyak 83% pada tanggal 27 Juli 2024 dari masyarakat Kabupaten Majalengka (Jaja sumarja, 2024).

Akan tetapi menjelang Pilkada lembaga survei lain yaitu Poltracking Indonesia melakukan survei yang sama setelah pendaftaran bakal calon ke KPU tepatnya pada tanggal 29 september 2024, pada survei ini Karna Sobahi mengalami penurunan tingkat kepuasan ketika ia menjabat menjadi bupati Majalengka dan mendapatkan presentase tingkat kepuasan sebanyak 60,7 %, presentase ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 22,3% dari tingkat kepuasan pada survei sebelumnya (Jonas, 2024).

Sebagai bupati petahana sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Karna Sobahi mengalami penurunan popularitas. Hal ini dipengaruhi oleh merosotnya pamor PDIP setelah kekalahan dalam Pilpres 2024, yang berdampak signifikan pada elektabilitas di masyarakat. Selain itu, faktor

lain yang turut melemahkan elektabilitas Karna Sobahi adalah maraknya pemberitaan mengenai kasus pidana yang menjerat anaknya, Irfan Nur Alam (Yedi Supriadi, 2025).

Meskipun banyak variabel yang diprediksi dapat menurunkan elektabilitas Karna Sobahi, hal ini tidak menutup fakta bahwa Karna Sobahi masih memiliki segudang keunggulan pada pagelaran Pilkada 2024. Ia mendapat dukungan kuat dari kelompok-kelompok lokal, seperti Persatuan Umat Islam (PUI), sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh salah satu pahlawan nasional di Majalengka dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Selain itu, Karna Sobahi juga memiliki basis pendukung yang solid melalui kelompok relawan yang dikenal sebagai Laskar (Lingkar Setia Karna).

Tabel 1. 1 Koalisi partai pendukung masing-masing kandidat pada Pilkada Kabupaten Majalengka 2024.

Koalisi Partai Pendukung Karna Sobahi – Koko Sukoyo	Koalisi Partai Pendukung Eman Suherman – Dhena M. Rhamdan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Buruh 4. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 6. Partai Ummat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya (Golkar) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5. Partai Demokrat 6. Partai Nasional Demokrat (NasDem) 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

	8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 10. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
--	--

Sumber: Cakrawala 2024

Dalam Pilkada 2024 Pasangan Karna Sobahi dan Koko Sukoyo turut didukung oleh koalisi partai politik yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat (Nurhidayat, 2024).

Sementara itu, Eman Suherman, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, maju sebagai penantang utama Karna Sobahi dalam Pilkada 2024 mendapatkan dukungan dari Koalisi akbar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Erick Disy Darmawan, 2024).

Persaingan di antara kedua pasangan calon berlangsung dengan intensitas tinggi, sehingga memunculkan polarisasi di kalangan masyarakat. Polarisasi ini mencerminkan perbedaan preferensi politik yang tajam. Masing-masing pasangan calon mengusung berbagai strategi kampanye, seperti penyampaian visi-misi, program kerja, blusukan, hingga penggunaan media sosial dalam kampanye untuk

meraih dukungan dari masyarakat. Aktivitas ini merupakan bagian integral dari upaya memperoleh legitimasi dalam kontestasi politik.

Masyarakat pendukung Karna Sobahi cenderung berasal dari kalangan yang puas dengan kinerjanya selama menjabat sebagai bupati, sementara pendukung Eman Suherman lebih banyak terdiri atas individu yang merasa kecewa terhadap kinerja Karna Sobahi selama menjabat dan menginginkan perubahan signifikan bagi kabupaten Majalengka. Sentimen negatif terhadap kedua pasangan calon tak dapat dihindari. Karna Sobahi mendapat sentimen negatif yang cukup tinggi akibat pengaruh keterlibatan anaknya, Irfan Nur Alam, dalam sejumlah kasus pidana. Namun, kasus tersebut tak semata berdampak kepada Karna Sobahi saja akan tetapi berdampak kepada Eman Suherman juga, hal ini terjadi karena Eman Suherman juga menjabat sebagai Sekertaris Daerah sebelumnya sehingga masyarakat melihat tak mungkin bahwa ia tak terlibat dalam kasus tersebut.

Kondisi ini menimbulkan prediksi bahwa persaingan suara antara kedua pasangan calon akan berlangsung sangat ketat. Namun demikian apa yang diprediksikan banyak pihak tak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, hasil resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan hasil berbeda dengan yang diprediksikan. Pasangan Eman Suherman dan Dheni Muhammad Ramdhan memperoleh suara sebesar 59,85%, unggul signifikan dibandingkan pasangan Karna Sobahi dan Koko Sukoyo yang hanya mendapatkan 40,15%.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan sebuah mini riset dengan melibatkan 10 mahasiswa asal Majalengka yang berkuliah yang terdiri dari 4 mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, 4 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, dan 2 mahasiswa Universitas Siliwangi sebagai responden. Studi ini berfokus pada preferensi pemilih serta alasan di balik pemilihan pasangan calon tertentu dalam Pilkada. Hasilnya menunjukkan bahwa enam dari sepuluh mahasiswa memilih pasangan Eman Suherman dan Dheni Muhammad Ramdhan, dua mahasiswa memilih pasangan Karna Sobahi, sementara dua lainnya memutuskan untuk tidak memberikan jawaban. Mayoritas alasan yang dikemukakan oleh responden yang memilih pasangan Eman Suherman adalah

efektivitas komunikasi politiknya. Hal ini tercermin dari seringnya responden menyebut tagline kampanye "sae" yang dianggap menarik perhatian.

Sebagaimana disampaikan oleh Kartika Nuri Sakinatul Alam, seorang mahasiswi Administrasi Publik UMB, *"Saya pilih Eman Suherman karena tagline 'Majalengka Langkung Sae' benar-benar terngiang-ngiang. Mungkin tanpa disadari, hal ini memengaruhi pilihan saya dalam Pilkada kemarin."* Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa komunikasi politik menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan kampanye Eman Suherman pada Pilkada 2024.



Gambar 1. 1 Cuplikan kampanye pasangan Eman Suherman dan Dena Muhammad Rhamdan

Gambar diatas merupakan cuplikan kampanye pasangan Eman Suherman dan Dena Muhammad Rhamdan ketika melakukan program jalan sehat di kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat narasi *"Jalan sehat menuju Majalengka Langkung Sae"* narasi tersebut mengisyaratkan bahwa visi dari pasangan Eman dan Dena adalah pengelolaan Majalengka lebih baik, penggunaan kata *"Langkung Sae"* menekankan bahwa mereka menganggap bahwa Majalengka pada kala itu belum mencapai keadaan yang optimal dan memilih mereka menjadi solusi untuk Majalengka yang lebih baik.

Secara konseptual, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan yang terkait dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan pengaruh

politik. Menurut McNair (1995), komunikasi politik adalah aspek penting dari pemerintahan dan demokrasi modern, yang melibatkan penyebaran dan pertukaran informasi antara entitas politik dan publik. Sehingga dapat dikatakan komunikasi politik merupakan interaksi strategis antara aktor politik, media, dan masyarakat yang bertujuan untuk membangun opini, mendukung kebijakan, memperoleh dukungan, atau meningkatkan elektabilitas seorang politisi. Secara sederhana, komunikasi politik merupakan bentuk komunikasi yang berpusat pada isu-isu politik yang relevan bagi masyarakat.

Dalam konteks politik kontemporer, komunikasi politik berperan sebagai salah satu elemen kunci dalam menentukan kesuksesan seorang politisi. Komunikasi politik yang efektif mampu membangun citra positif, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan peluang elektoral. Hal ini tercermin dalam strategi Eman Suherman, yang berhasil menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan cara yang jelas dan menarik menggunakan tagline andalannya "*Majalengka Langkung Sae*" yang ikonik sehingga memberikan kesan aspiratif terhadap perubahan positif, yang dirasakan relevan oleh masyarakat. Tagline ini tidak hanya memperkuat dukungan publik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Eman Suherman dan Dheni Muhammad Rhamdan dimana mereka mendapatkan elektabilitas dengan presentase cukup tinggi di angka 56,9 % pada survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia.

Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang cukup tinggi, pasalnya perkembangan teknologi yang telah merambah ke aspek komunikasi menciptakan media sosial sebagai salah satu alat kampanye politik yang sangat strategis. Penggunaan platform media sosial sebagai poros kampanye politik telah menjadi aspek penting yang tak dapat diabaikan begitu saja dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pada Pilkada 2024. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, terutama media sosial, telah mengubah dinamika interaksi antara politisi dan publik. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikutip dari We Are Social yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial Instagram di Indonesia mencapai 120 juta pengguna per bulan pada Januari 2024 (Andi Dwi Riyanto,

2024). Meninjau hal tersebut, kampanye politik melalui media sosial menjadi sebuah strategi yang perlu ditegaskan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan publik. Platform ini memungkinkan politisi atau kandidat untuk berinteraksi secara langsung, menyampaikan pesan secara cepat, dan menyesuaikan kampanye dengan kebutuhan serta preferensi audiens.

Media sosial Instagram sebagai salah satu platform media sosial dengan pengguna terbanyak dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi calon pemimpin untuk membangun citra publik dan meraih dukungan. *Branding* yang dilakukan di Instagram kerap memberikan efek yang cukup efektif dalam memengaruhi preferensi pemilih, terutama pada Gen Z dan milenial. Hal ini terjadi karena Instagram memiliki fitur yang mendukung visualisasi pesan, seperti foto, video, dan cerita singkat (*stories*), yang menarik perhatian kelompok usia tersebut yang cenderung lebih responsif terhadap konten visual. Selain itu, algoritma Instagram memungkinkan politisi untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik melalui iklan berbayar dan penggunaan tagar yang relevan, sehingga pesan kampanye lebih terarah dan personal. Interaktivitas juga menjadi salah satu faktor utama. Fitur seperti komentar, siaran langsung (*live streaming*), dan pesan langsung (*direct message*) memungkinkan politisi untuk berkomunikasi langsung dengan audiens mereka, membangun kedekatan, dan memperkuat citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang lumrah ketika para politisi menggunakan platform Instagram dalam kampanye politik untuk menjangkau pemilih muda, memperkuat pesan politik, serta membangun hubungan yang lebih personal dan autentik.

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Majalengka, Eman Suherman sebagai salah satu kandidat calon bupati memanfaatkan Instagram sebagai platform utama untuk menjalin komunikasi dengan para konstituennya.



Gambar 1. 2 Postingan Instagram Eman Suherman

Penggunaan Media sosial Instagram sebagai upaya pembentukan citra positif di publik dan penjalinan komunikasi dengan konstituen atau pendukung kerap digunakan oleh Eman Suherman. Sebagaimana pada gambar 1.2 dimana Eman Suherman membuat postingan apresiasi kepada salah satu masyarakat Majalengka dengan username ig @ricky_putra1405 yang berhasil menggunakan teknologi sebagai sumber penghasilan dengan memanfaatkan platform Youtube. Pada postingan ini Eman Suherman mencoba memberikan kesan dekat dengan masyarakat dan sigap untuk mengapresiasi prestasi yang ada di masyarakat.

Postingan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa Eman Suherman cukup aktif dalam menggunakan sosial media dalam upaya membentuk citra politik yang baik di masyarakat, di sisi lain hasil perolehan suara yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa Eman Suherman unggul dengan persentase hampir 20% lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, Karna Sobahi, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati petahana.

Hal ini memunculkan hipotesis bahwa strategi komunikasi politik yang efektif dan kreatif melalui media sosial Instagram menjadi salah satu faktor kunci

keberhasilan Eman Suherman. Dengan mengedepankan karakteristik *branding* yang merakyat, Eman Suherman mampu menciptakan citra positif yang dekat dengan rakyat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Majalengka. Tagline "*Majalengka Langkung Sae*" tidak hanya menjadi sekadar slogan, tetapi juga menjadi simbol aspirasi perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Eman Suherman berhasil mengintegrasikan pesan-pesan kampanye yang menggugah secara emosional dengan strategi media sosial yang kuat, menciptakan hubungan yang lebih personal dengan para pemilih (andi hermawan, 2024).

Di era digital saat ini, di mana teknologi merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, politisi dituntut untuk beradaptasi dengan komunikasi digital untuk menarik pemilih. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Eman Suherman di Instagram, khususnya melalui *feeds* Instagram pada kontestasi Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak komunikasi politik di Instagram terhadap citra Eman Suherman di masyarakat Majalengka. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Strategi Komunikasi Politik Eman Suherman di Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Citra Publik pada Pilkada 2024."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Eman Suherman melalui media sosial Instagram?
2. Bagaimana dampak penggunaan media sosial Instagram terhadap citra Eman Suherman di mata masyarakat dalam kontestasi Pilkada 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang diterapkan Eman Suherman melalui penggunaan fitur-fitur Instagram untuk menjangkau dan memengaruhi konstituen.

2. Mengevaluasi dampak penggunaan media sosial Instagram terhadap citra Eman Suherman di mata masyarakat sebagai calon bupati di kontestasi Pilkada 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Kegunaan Akademis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik di era digital.
2. Menambah literatur tentang strategi komunikasi politik melalui platform media sosial, khususnya Instagram, dalam meningkatkan citra publik seorang kandidat politik.
3. Memperkuat pemahaman mengenai strategi komunikasi politik yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan audiens di era digital.

b) Kegunaan Praktis

1. Memberikan referensi bagi politisi dan tim kampanye dalam menyusun strategi komunikasi politik yang lebih efektif melalui media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan publik.
2. Memberikan panduan bagi praktisi komunikasi politik untuk memanfaatkan fitur-fitur media sosial secara optimal dalam membangun citra publik dan mengelola hubungan dengan konstituen.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi politik yang transparan dan interaktif sebagai bagian dari proses demokrasi.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Eman Suherman melalui media sosial Instagram dalam membangun citra publiknya selama Pilkada 2024 di Kabupaten Majalengka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana berbagai elemen dalam

komunikasi politik yang dilakukan oleh Eman Suherman melalui platform Instagram berkontribusi terhadap peningkatan citra publiknya, serta dampaknya terhadap tingkat dukungan masyarakat. Strategi komunikasi politik dalam konteks ini merujuk pada rancangan-rancangan yang dilakukan oleh Eman Suherman dalam menyampaikan pesan pada kontestasi Pilkada 2024 yang sehingga dapat mempengaruhi audiens, pada hal ini difokuskan pada masyarakat Majalengka yang aktif menggunakan media sosial instagram, untuk membentuk persepsi yang positif dan mendukungnya dalam Pilkada 2024 (Raudhatul Jannah & Jauhari, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap unggahan Instagram Eman Suherman. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap konten yang dipublikasikan, mencakup foto, video, *caption*, interaksi komentar, dan fitur lain seperti *live streaming*.

Untuk mengukur apakah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Eman Suherman efektif dalam meningkatkan citra publik, penulis menggunakan Teori Agenda Setting (McCombs & Shaw, 1972) sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Teori ini menekankan bahwa media memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, Instagram menjadi alat strategis bagi Eman Suherman dalam mengontrol isu politik yang diangkat, membentuk perhatian publik, dan memperkuat citra dirinya sebagai calon pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Sebagai teori pendukung, Teori Dramaturgi (Goffman, 1959) digunakan untuk menganalisis bagaimana Eman Suherman mengelola citra publik melalui media sosial Instagram. Menurut Goffman, kehidupan sosial dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan drama, di mana individu berperan sebagai aktor yang berusaha menciptakan impresi tertentu di hadapan audiens. Dalam penelitian ini, Eman Suherman bertindak sebagai aktor yang membangun citra melalui konten media sosialnya, menciptakan skenario politik yang memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, transparan, dan berorientasi pada perubahan (Kurniasih & Setianti, 2024).

Komunikasi politik melalui media sosial menjadi faktor utama dalam membangun citra publik Eman Suherman. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi konten politik yang diunggah, yang mencerminkan visi-misi, program kerja, serta aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Eman Suherman. Interaksi dengan audiens dianalisis melalui keterlibatan dalam komentar, balasan terhadap pertanyaan publik, serta diskusi melalui *live streaming* yang memperlihatkan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, *engagement* media sosial diukur melalui jumlah *like*, komentar, dan bentuk interaksi lainnya untuk memahami seberapa jauh konten yang diunggah dapat menarik perhatian publik. Persepsi masyarakat terhadap citra yang dibangun juga menjadi bagian dari analisis, dengan melihat bagaimana unggahan tersebut menciptakan koneksi emosional dengan pemilih dan membentuk kesan mengenai kredibilitas serta kepemimpinan Eman Suherman.

Strategi komunikasi politik Eman Suherman ditinjau dengan menganalisis seberapa sering isu-isu yang dikampanyekan muncul di Instagram, konsistensi pesan dalam membangun citra politik, serta bagaimana respons masyarakat terhadap unggahan tersebut. Teori Agenda Setting digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi dijalankan dengan melihat bagaimana isu-isu yang dikampanyekan oleh Eman Suherman menjadi topik diskusi di media sosial, seberapa sering isu tersebut disebarkan kembali oleh pengguna lain, serta bagaimana audiens memberikan tanggapan melalui komentar dan interaksi lainnya. Jika pesan yang disampaikan secara konsisten mendapat perhatian publik dan menjadi bagian dari diskursus politik lokal, maka komunikasi politik dapat dikatakan efektif. Selain itu, keterkaitan antara isu yang diangkat dengan persepsi publik terhadap Eman Suherman juga menjadi indikator penting dalam analisis ini.

Teori Dramaturgi, sebagai teori pendukung, membantu memahami bagaimana Eman Suherman mengelola citranya di ruang digital. Teori ini menganalisis bagaimana ia menampilkan dirinya dalam "panggung depan" media

sosial melalui pemilihan konten, ekspresi dalam foto dan video, serta cara berinteraksi dengan audiens. Semakin autentik dan konsisten citra yang ditampilkan dengan ekspektasi publik, semakin tinggi pula tingkat keefektifan strategi komunikasi tersebut hal ini akan membuat semakin tinggi juga pengaruhnya kepada audiens. Interaksi di kolom komentar, cara ia merespons kritik, dan konsistensi dalam membangun narasi politik juga menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan komunikasi politik berbasis media sosial ini.



